



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1 / I /TAHUN 2024/SETDA

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, maka perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal 2 Januari 2024

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19740626 199311 1 002

Tembusan :

- Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
- Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
- Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Benteng;
- Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 1 / I /TAHUN 2024 /SETDA
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2024
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP	DALAM STRUKTURAL ORGANISASI
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	ANDI MUHAMMAD AWALUDDIN, SAP/ 19791213 200604 1 020	Kepala Bagian Umum dan Protokol s d a
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	s d a	s d a
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	s d a	s d a
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	s d a	s d a
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	s d a	s d a
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	s d a	s d a
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	s d a	s d a
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	s d a	s d a
10	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	s d a	s d a
11	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	s d a	s d a
12	Penyediaan Dana Penujang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	s d a	s d a
13	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	s d a	s d a
14	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	s d a	s d a
14	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	s d a	s d a
II	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM A. BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ANDI MUHAMMAD AWALUDDIN, SAP/ 19791213 200604 1 020	Kepala Bagian Umum dan Protokol s d a
2	Bimbingan Teknis, Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	s d a	s d a
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	s d a	s d a
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	s d a	s d a

NAMA KEGIATAN		NAMA/NIP	JABATAN DALAM STRUKTURAL ORGANISASI
1	2	3	4
5	Penyediaan Bahan/Material	s d a	s d a
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	s d a	s d a
7	Pengadaan Mebel	s d a	s d a
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	s d a	s d a
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya	s d a	s d a
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	s d a	s d a
11	Penyediaan Jasa Peayanan Umum Kantor	s d a	s d a
12	Pemeliharaan Mebel	s d a	s d a
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	s d a	s d a
14	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	s d a	s d a
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	s d a	s d a
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	s d a	s d a
17	Fasilitas Keprotokolalan	s d a	s d a
18	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	s d a	s d a
B. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANDI MUHAMMAD AWALUDDIN, SAP/ 19791213 200604 1 020	Kepala Bagian Umum dan Protokol s d a s d a
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
C. BAGIAN ORGANISASI			
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
2	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	MUHLIANA M, S.T/19730301 200803 2 002	Kepala Bagian Organisasi s d a s d a s d a
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
4	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT A.			
BAGIAN PEMERINTAHAN			
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dr. TAJUDDIN MAKKA, S.STP.,.M.M./ 19830910 200312 1 005	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
3	Fasilitas Otonomi Daerah	s d a	s d a
4	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	s d a	s d a
B. BAGIAN HUKUM			
1	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Drs. MUSTYARI, MM. Pub/19681018 198931 1 007	Kepala Bagian Hukum

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP	DALAM STRUKTURAL ORGANISASI
1	2	3	4
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	s d a s d a	s d a s d a
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		
1	<p>C. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</p> <p>1 Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi</p> <p>2 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten</p> <p>3 Pelaksanaan Pemberangkatan Jamaah Haji</p> <p>4 Pelaksanaan Pemulangan Jamaah Haji</p> <p>5 Pelaksanaan Lomba Festival Dai</p> <p>6 Pelaksanaan Lomba Azan</p> <p>7 Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah/Bansos</p> <p>8 Pengelolaan dan Evaluasi Pendidik Tilawatil Qur'an, Kitab Kuning, Hafidz dan Imam Tetap Mesjid Agung</p> <p>9 Pelaksanaan Hari-hari Besar Islam</p> <p>10 Penyaluran Insentif Guru BTQ</p> <p>11 Pemberian Santunan Veteran kepada Anggota Veteran dan Onderstand</p>	<p>H. SAMSUL BAHRI, S.E./19701016 199803 1 012</p> <p>s d a</p>	<p>Kepaa Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>s d a</p>
IV	<p>ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</p> <p>A. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</p> <p>1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan</p> <p>2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</p> <p>3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</p> <p>4 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</p> <p>5 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</p> <p>6 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah</p>	<p>MURSALIM, S.Sos./19841207 201101 1 010</p> <p>s d a</p>	<p>Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Air</p> <p>s d a</p>
B. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN I.	<p>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sub Kegiatan :</p> <p>1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan</p> <p>2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</p> <p>3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</p>	<p>Drs. TAUFIQ NURHARAS, M. Ec.Dev/ 19680828 198811 1 002</p>	<p>Kepala Bagian Administrasi Pembangunan</p>
C. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	<p>1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<p>HASRUL, S.E./19790129 200604 1 011</p>	<p>Kasubag. Pengelolaan Barang dan Jasa</p>

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3	4
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	s d a	s d a
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	s d a	s d a

a.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. MESDIYONO, M.Ec., Dev
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 NIP. 19740626 199311 1 002

- LULITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
 - Dokumen ini dilandatangan/ secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code